



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR GUBERNUR
Jl. P. Sudirman No. 10 Medan - Sumut
www.sumutprov.go.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa hanya patut kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan HidayahNya Buku Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Semangat keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara mulai dikembangkan pasca diundangkannya UU KIP pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi pada badan publik merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara. Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak setiap warga negara dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara yang merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi.

PPID yang merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan informasi publik berkewajiban memberikan laporan terkait pelaksanaan layanan informasi. Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Provinsi Sumatera Utara kepada *stakeholders* antara lain Komisi Informasi Pusat, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai badan publik.

PPID Provinsi Sumatera Utara akan terus berusaha mengoptimalkan layanan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Organisasi Perangkat Daerah sebagai PPID Pembantu serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

Medan, April 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU ATASAN PPID PROVSU

Dr. Ir. H. R. SABRINA, M.Si
Pemula Utama
NIP. 19610512 198602 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I PENDAHULUAN.....	1
II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	2
III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
IV KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	29
V RENCANA TINDAK LANJUT	30
LAMPIRAN	
1. DAFTAR SIDANG SENGKETA INFORMASI INFORMASI PPID PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019	39
2. DAFTAR SIDANG SENGKETA INFORMASI PPID KABUPATEN/KOTA SE – SUMATERA UTARA TAHUN 2019	40
3. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID TAHUN 2019	45
4. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.....	61
5. KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/764/KPTS/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SUMATERA UTARA	82
6. KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/765/KPTS/2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SUMATERA UTARA	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Provinsi Sumatera Utara 3

Gambar 2 *Front Office* dan Registrasi PPID Provinsi Sumatera Utara 4

Gambar 3 Ruang Layanan Informasi PPID Provinsi Sumatera Utara 4

Gambar 4 *Back Office* dan Pengolahan Informasi PPID Provinsi Sumatera Utara 5

Gambar 5 Sistem Informasi Layanan Informasi Publik PPID Provinsi Sumatera Utara..... 5

Gambar 6 Bagan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara 9

Gambar 7 Forum Koordinasi PPID se Provinsi Sumatera Utara..... 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar alamat <i>email</i> PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.....	6
Tabel 2	Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	8

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Sumatera Utara. PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang dibentuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau unit kerja lain. Adapun tugas PPID adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai badan publik telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sejak tahun 2012 sesuai amanat UU KIP dengan dikeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/84/KPTS/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi pada setiap OPD sebagai PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan, maka pada tahun 2017 ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

Kehadiran PPID Pembantu dirasakan dapat memperlancar proses pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang layanan informasi publik, Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID Pembantu. Hal ini dilakukan untuk membentuk kesamaan pandangan dan pemahaman mendasar tentang keterbukaan informasi publik. Bimbingan teknis ini ditujukan kepada para petugas informasi yang melek teknologi informasi agar pemberian layanan informasi semakin baik dengan memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi yang telah tersedia.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain dengan mengoptimalkan portal Provinsi Sumatera Utara (www.sumutprov.go.id) yang telah ada dengan memperbaharui konten terkait layanan informasi publik. Selain itu juga telah disediakan alamat email PPID Utama Provinsi Sumatera Utara (ppid@sumutprov.go.id) dan alamat email seluruh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemanfaatan Sistem Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) yang terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 telah dinyatakan bahwa Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) telah menghimpun data layanan informasi dan dokumentasi dari seluruh PPID Pembantu yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pemberian layanan publik tahun 2020. Dalam rangka pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai Sekretariat PLID Provinsi Sumatera Utara.

1. SARANA DAN PRASARANA

PPID Provinsi Sumatera Utara saat ini telah memiliki ruangan khusus dalam rangka pemberian layanan informasi publik yang optimal. Setiap pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung dan menggunakan formulir kertas akan diterima oleh petugas informasi. Demikian juga halnya kepada pemohon informasi yang datang langsung dengan memanfaatkan aplikasi layanan informasi secara digital juga akan dipandu oleh petugas informasi.

Untuk meregistrasi seluruh permohonan informasi, petugas informasi telah dilengkapi dengan formulir permohonan informasi, buku register layanan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir keberatan atas informasi publik, buku register keberatan informasi publik sesuai Lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Gambar 1
SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PROVINSI SUMATERA UTARA



Setiap pemohon informasi yang datang langsung akan diarahkan menuju ruang layanan informasi PPID (*front office*) yang berada pada bagian depan gedung kantor setelah melakukan registrasi dan pengisian *form*

kunjungan tamu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2
FRONT OFFICE DAN REGISTRASI
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA



Dalam ruang layanan informasi telah disediakan kursi tamu dan meja untuk koordinasi maupun konsultasi terkait layanan informasi publik. Pada bagian depan ruangan telah disediakan televisi berukuran besar yang terhubung langsung dengan perangkat komputer pada ruangan pengolahan informasi (*back office*) yang tepat berada di belakang ruang layanan informasi.

Gambar 3
RUANG LAYANAN INFORMASI
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA

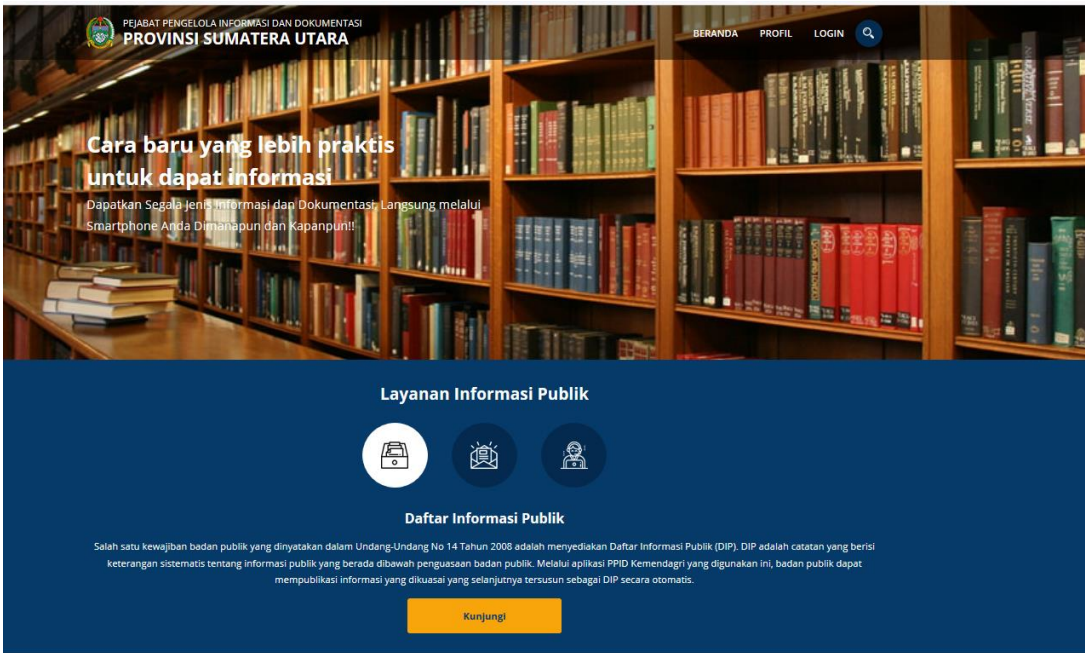


Gambar 4
BACK OFFICE DAN PENGOLAHAN INFORMASI
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA



Dalam rangka menyampaikan informasi kepada publik, PPID Provinsi Sumatera Utara telah dilengkapi dengan aplikasi SIP-PPID yang langsung dapat diakses melalui alamat <http://ppid.sumutprov.go.id/>. Aplikasi ini menyajikan berbagai informasi yang telah disediakan oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seluruh informasi yang siap untuk diakses langsung tersedia dalam bentuk daftar informasi publik (DIP). Jika ada informasi yang dibutuhkan tetapi belum tersedia pada DIP, telah disediakan *form* pengisian permohonan informasi publik baik secara manual ataupun digital yang selanjutnya akan diproses sesuai prosedur dalam UU KIP.

Gambar 5
SISTEM INFORMASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA



Bagi pemohon informasi yang akan mengajukan permohonan informasi publik secara langsung dapat berkunjung ke Sekretariat PPID Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jl. H. M. Said Nomor 27 Medan, telepon (061) 4527254, Fax (061) 4500185, *email* : ppid.sumutprov.go.id atau juga ke alamat *email* PPID Pembantu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1
DAFTAR ALAMAT EMAIL PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	PPID PEMBANTU	ALAMAT EMAIL
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Cq. Biro Humas dan Keprotokolan	ppid.humas@sumutprov.go.id
2.	Sekretariat DPRD	ppid.dprd@sumutprov.go.id
3.	Dinas Bina Marga	ppid.binamarga@sumutprov.go.id
4.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	ppid.disesdm@sumutprov.go.id
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	ppid.disbudpar@sumutprov.go.id
6.	Dinas Kehutanan	ppid.dishut@sumutprov.go.id
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	ppid.dkp@sumutprov.go.id
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ppid.disdukcapil@sumutprov.go.id
9.	Dinas Kesehatan	ppid.diskes@sumutprov.go.id
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	ppid.dishanpangnak@sumutprov.go.id
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	ppid.diskominfo@sumutprov.go.id
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	ppid.diskopukm@sumutprov.go.id
13.	Dinas Lingkungan Hidup	ppid.dlh@sumutprov.go.id
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ppid.dispmd@sumutprov.go.id
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	ppid.dispppa@sumutprov.go.id
16.	Dinas Pemuda dan Olahraga	ppid.dispora@sumutprov.go.id
17.	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	ppid.dispmptsp@sumutprov.go.id
18.	Dinas Pendidikan	ppid.disdik@sumutprov.go.id
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ppid.disppkb@sumutprov.go.id

1	2	3
20.	Dinas Perhubungan	ppid.dishub@sumutprov.go.id
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	ppid.disperindag@sumutprov.go.id
22.	Dinas Perkebunan	ppid.disbun@sumutprov.go.id
23.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	ppid.perpusip@sumutprov.go.id
24.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	ppid.dispkip@sumutprov.go.id
25.	Dinas Sosial	ppid.dissos@sumutprov.go.id
26.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	ppid.sdack@sumutprov.go.id
27.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	ppid.distph@sumutprov.go.id
28.	Dinas Tenaga Kerja	ppid.disnaker@sumutprov.go.id
29.	Satpol PP	ppid.satpolpp@sumutprov.go.id
30.	Inspektorat	ppid.inspektorat@sumutprov.go.id
31.	Badan Kepegawaian Daerah	ppid.bkd@sumutprov.go.id
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ppid.bakesbangpol@sumutprov.go.id
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ppid.bpbdb@sumutprov.go.id
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan	ppid.balitbang@sumutprov.go.id
35.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	ppid.bpkad@sumutprov.go.id
36.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	ppid.bpprd@sumutprov.go.id
37.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ppid.bapsdm@sumutprov.go.id
38.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ppid.bappedda@sumutprov.go.id
39.	Badan Penghubung Daerah	ppid.bahupda@sumutprov.go.id
40.	Rumah Sakit Haji Medan	ppid.rshaji@sumutprov.go.id
41.	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	ppid.rsjiwa@sumutprov.go.id

2. ANGGARAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik. Salah satu bentuk komitmen yang dilakukan adalah dengan memberikan dukungan anggaran dan keuangan pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020 dikarenakan terjadi

Bencana Non Alam Corona Virus Deases 2019 (Covid-19) di seluruh Indonesia sehingga seluruh Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah di Anggarkan di Tahun 2020 harus di Refocusing untuk penanganan bencana tersebut. Adapun jumlah anggaran yang dilaksanakan oleh maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp. 1.918.758.124,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah), kegiatan yang dilaksanakan adalah Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara; Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi; Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu; dan Peningkatan SDM Keterbukaann Informasi.

Meskipun pandemi Covid-19 sedang melanda seluruh Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara, PPID Provinsi Sumatera Utara tetap mengoptimalkan layanan informasi publik dengan keterbatasan Anggaran.. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah operasional dalam mendukung kelancaran tugas PPID, penyediaan dan peningkatan sarana pendukung publikasi informasi, bimbingan teknis dan rapat koordinasi serta konsultasi.

PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyediakan anggaran dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik di OPD. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah operasional dalam mendukung kelancaran tugas PPID, penyediaan dan peningkatan sarana pendukung publikasi informasi, bimbingan teknis dan rapat koordinasi serta konsultasi. Adapun rincian anggaran dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada PPID Pembantu dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
ANGGARAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	PPID PEMBANTU	ANGGARAN
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	71.048.000,-
2.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	42.714.000,-
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	152.037.200,-
4.	Dinas Perkebunan	354.092.100,-

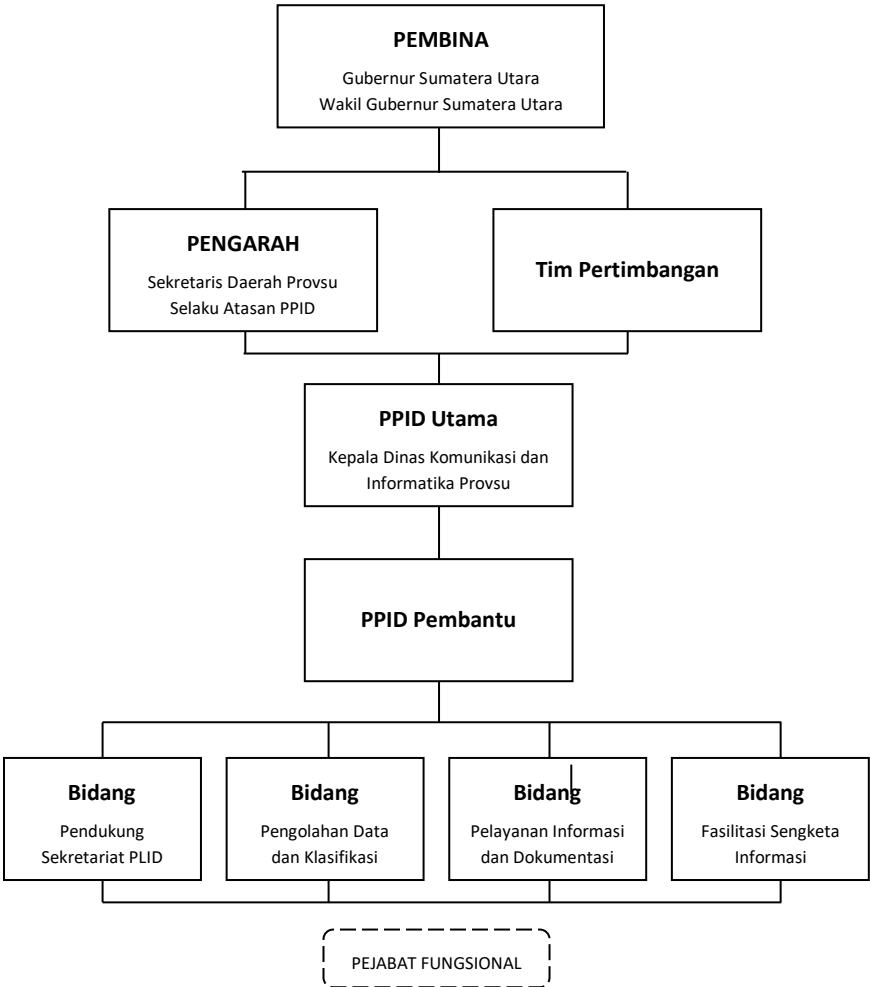
NO	PPID PEMBANTU	ANGGARAN
5.	Dinas Tenaga Kerja	330.005.400,-
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86.150.000,-

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi telah ditetapkan PPID yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dalam pemberian layanan informasi publik, Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun penetapan personil PPID Provinsi selain berdasarkan jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian dan keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing-masing petugas informasi. Berdasarkan keputusan gubernur ditetapkan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan PPID Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 6
 BAGAN STRUKTUR
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PROVINSI SUMATERA UTARA



4. PRESTASI / PENGHARGAAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu Badan Publik yang mendapat peringkat CUKUP INFORMATIF kategori Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada Tahun 2020. Meski mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 yang mendapat peringkat INFORMATIF, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen tetap memberikan pelayanan informasi publik yang Optimal untuk tercapainya keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	PPID Pembantu	Tanggal Permohonan	Pemohon Informasi	Asal/Profesi	Informasi yang diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
							Terima	Tolak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Satgas Covid-19	25 Mei 2020	DPP Lembaga Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik	LSK	pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Sumatera Utara dengan memberikan pembagian dan penyaluran paket bantuan social berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak Covid-19	Surat	√		Selesai
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3 September 2020	Yayasan Persada Indonesia Satu	LSM	Realisasi Anggaran	Surat Resmi	√		Selesai
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Maret	Nasron Situmeang	Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia	Data Prestasi Kerja atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017	Datang Langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan	√		
		4 Maret	Sri Wahyuni, S.Kom, M.Kom	Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	Data Hasil Tangkapan Ikan	Datang Langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan	√		
		02 April	Rasi Kasim Samosir	Mahasiswa Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan USU (Kelas Khusus Kemenpora)	Data Produksi Perikanan Tangkap	Datang langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan	√		
		04 April	Tohap P Sihaloho, SH	Ditpolair	1. Data produksi perikanan tangkap 2. Data Jumlah Kapal Perikanan	Datang Langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan	√		
		30 April	Jusep Fajar Purba, SE	PNS pada Balibang Kab. Labuhanbatu	1. Pedoman Perhitungan Pendapatan Nelayan 2. Nilai Tukar Nelayan	Datang Langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan	√		
		23 Mei	Retno Agus Haryani	Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan UNRI	Data kontribusi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Provsu	Datang Langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan	√		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13 Juli	Rina Fariani Saragih	Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	1. Data Produksi perikanan 2. Data Nelayan di Kab. Nias Selatan	Datang Langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan	√		
		27 Agustus	Mika Andi Sihombing	Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU	1. Data Pegawai 2. Data Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	Datang Langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan	√		
8	Dinas Kesehatan	28 Februari 2020	M. Budi Alamsyah	Masyarakat	ASN yang merangkap jabatan di RS Kusta Lau Simomo	Melalui Surat	√		Dijawab dan disampaikan secara tertulis
		28 Agustus 2020	Yhonatan F.P	Lembaga Study dan Advokasi Kebijakan/ELS AKA	Data Jumlah Kematian Ibu dan Anak di Sumatera Utara	Melalui Surat	√		Sudah diberikan Softcopy dan Hardcopy
		9 September 2020	Satia	Wartawan Tribun Medan	Data Jumlah DBD Tahun 2019	Melalui Surat	√		Sudah diberikan Hardcopy
		22 Oktober 2020	PT. Adhi Karya (Persero).Tbk	BUMN	1. Data Sekunder Rumah Sakit/Klinik	Melalui Surat	√		Bahan sudah disiapkan tetapi tidak diambil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	16 Januari	Dwi Delviyanti	Universitas Potensi Utama	Data Sapi Brahman Cross Sistem Pakar Mendiagnosa Hama dan Penyakit pada tanaman Pepaya menggunakan metode <i>Certainty Factor</i>	Surat Resmi	√		Diarahkan langsung ke Bidang Peternakan
		22 Februari	Puspa Dumasari Saragih	Mahasiswa	Data Konsumsi Beras per Kabupaten dan Data Konsumsi Bawang Merah per Kabupaten	Surat Resmi	√		Diarahkan ke Bidang Konsumsi
		29 Maret	Rif'ah Khairani Harahap	Fakultas Pertanian USU	Data Permintaan dan Konsumsi Kacang Hijau	Surat Resmi	√		Diarahkan ke Bidang Konsumsi
		17 April	Indah Fatma Devi	Universitas - Potensi Utama	Data Konsumsi Jambu Madu	Surat Resmi	√		Diarahkan ke Bidang Konsumsi
		20 Mei	Isgi Mayani Sagala	Mahasiswa	Data Harga Kedelai dan Jagung serta konsumsi Kedelai dan pakan ternak Sumatera Utara	Surat Resmi	√		Diarahkan ke Bidang Konsumsi
		20 Juni	Kristina Nova Lumban Toruan	Fakultas Pertanian Methodist Indonesia	Harga daging sapi dan sapi bakalan serta produksi daging sapi dan sapi bakalan	Surat Resmi	√		Diarahkan ke Bidang Peternakan
		17 Juli	Zulfahri Amin P	Mahasiswa	Data harga susu sapi di kota medan	Surat Resmi	√		Diarahkan ke Bidang Distribusi
		20 Agustus	Ridwan Fadly Mahasiswa	Mahasiswa	Data konsumsi dan produksi beras sumatera utara	Surat Resmi	√		Diarahkan ke Bidang Konsumsi
		17 September	Muhammad Salman Harahap	Fakultas Pertanian USU	Hara jagung Loka dan Produksi jagung sumatera utara	Surat Resmi	√		Diarahkan ke Bidang Distribusi
		11 Oktober	M. Fahriza Ikhsan	Fakultas Pertanian USU	Data Konsumsi Tahu di Medan	Surat Resmi	√		Diarahkan ke Bidang Konsumsi
		30 November	Evi Wulandary	UNSIYAH	Wawancara dengan Kadis	Surat Resmi	√		Diarahkan langsung ke Kadis
		9 Desember 2018	Deni Siahaan	LSM	Wawancara dengan Kadis	Datang Langsung	√		diarahkan langsung ke Kadis

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Juni 2020	Heri Siswoyo & Hoko Judho Putra	Wartawan	Realisasi Anggaran	Melalui Surat	√		Selesai
		3 Juli 2020	DPP Lembaga Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik	LSM	pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Sumatera Utara dengan memberikan pembagian dan penyaluran paket bantuan social berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak Covid-19	Melalui Surat	√		Sudah diteruskan ke OPD Terkait
		3 September 2020	Yayasan Persada Indonesia Satu	LSM	Temuan Pembangunan Penataan Kawasan Kumuh (Pidoli) di Kabupaten Mandailing Natal TA. 2018	Melalui Surat	√		Sudah diteruskan ke OPD Terkait
		20 Februari 2019	Kurniawan	LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia	Temuan Dugaan Perizinan yang dimiliki oleh PT. Capital Hutana Minning	Melalui Surat	√		Sudah diteruskan ke OPD terkait
		28 Maret 2019	Safarudin	Karyawan Swasta	Daftar Pemegang Izin Usaha Pertambangan di Sumatera Utara	Melalui Aplikasi	√		Sudah diteruskan ke OPD Terkait
		2 April 2019	Feri Kusuma	Badan Pekerja Kontras	Daftar Informasi yang dikecualikan oleh PPID Provinsi Sumatera Utara	Melalui Surat	√		Dijawab langsung oleh Tim
		26 April 2019	Wenny Kusuma	Karyawan Swasta	Data Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara 10 Tahun terakhir	Malalui Aplikasi	√		Sudah diteruskan ke OPD Terkait

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 Mei 2019	Ali Agasi	Karyawan Swasta	Peta Provinsi Sumatera Utara	Melalui Aplikasi	√		Sudah dijawab oleh Tim
		1 Agustus 2019	Ibnu Hajar	Karyawan Swasta	Daftar Seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada APBD Provinsi Sumatera Utara yang telah dilelang	Melalui surat	√		Sudah dijawab oleh Tim
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	18 Januari 2019	Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih (PDPK)	LSM	Amdal PLTU Unit 3 & 4 Pangkalan Susu	Melalui Surat	√		Hardcopy sudah diambil oleh pemohon
		22 Februari 2019	Mahasiswa		Peta Lokasi Daerah yang menjadi kegiatan Pembangunan SUTET Kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhanbatu dan Mandina)	Melalui Surat	√		Dijawab melalui Surat
		17 Mei 2019	WALHI Sumut	LSM	AMDAL PLTU Unit 3 & 4 Pangkalan Susu	Melalui Surat	√		Hardcopy sudah diambil oleh pemohon
		19 Juni 2019	Fhiliya Hilma Sari Br. Sinulingga	Karyawan Swasta	AMDAL PLTU 2 x 150 MW Paluh Kurah	Melalui Surat	√		Hardcopy sudah diambil oleh pemohon
		31 Juli 2019	Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba	Mahasiswa	AMDAL PT. Aqua Farm	Melalui Surat	√		Hardcopy sudah diambil oleh pemohon
		5 Agustus 2019	LSM Gerakan Mahasiswa Peduli Aset	LSM	AMDAL PT. TPI. PT. ALLEGRINDO, PT. JAPFA dan PT. GORGA DUMASARI	Melalui Surat	√		Hardcopy sudah diambil oleh pemohon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13 Desember 2019	LSM DPD Jaringan Informasi Nasional Sumatera Utara	LSM	Penjelasan penggunaan alokasi APBD dan P.APD 2019	Melalui Surat	√		Sudah dijawab oleh Tim
13	Dinas Pendidikan	18 Novemnber 2019	Kurniawan	LSM	Konfirmasi pekerjaan swakelola di Dinas Pendidikan Provsu TA. 2019	Melalui Aplikasi	√		Dijawab dan disampaikan secara tertulis
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10 Januari 2019	Rina Maisyarah Nasution	Mahasiswa UMA	Data/Riset dan Wawancara	Melalui Surat Resmi	√		Memberikan data sesuai dengan permintaan
		25 Januari 2019	Mely Simanjuntak	Mahasiswa	Riset	Melalui Surat Resmi	√		Memberikan data sesuai dengan permintaan
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	14 Februari 2019	BKPMT	LSM	Kegiatan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan KB	Dialog	√		Sudah dijawab langsung oleh Tim
		9 Agustus 2019	Mahasiswa S2 Pascasarjana USU	Mahasiswa	Kegiatan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan KB	Dialog	√		Sudah dijawab langsung oleh Tim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27 September 2019	FKPPI	Organisasi Pemuda	Kegiatan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan KB	Dialog	√		Sudah dijawab langsung oleh Tim
18	Dinas Perkebunan	30 Januari 2019	Sri Wulandari	Mahasiswa	Informasi Luas Areal, Produksi dan Produktifitas Kakao	Mengambil langsung, mendapatkan salinan informasi	√		
		7 Februari 2019	M. Nur Alfian	Wartawan	Data Perkebunan Sawit dan data Perubahan Pengelola Sawit	Mengambil langsung, mendapatkan salinan informasi	√		
		18 Mei 2019	Fenny Sri Mariani Sinurat	Mahasiswa	Data Luas dan produksi kopi di kabupaten simalungun tahun 1997-2016	Mengambil langsung, mendapatkan salinan informasi	√		
		19 Juli 2019	Azrian Finana Lubis	Mahasiswa	Sejarah Perusahaan, Visi, Misi, Struktur Organisasi dan tugas wewenang	Mengambil langsung, mendapatkan salinan informasi	√		
		4 Oktober 2019	Sabar Simanjuntak	Pegawai BUMN	Informasi data perkebunan dan data produksi hasil perkebunan Kab. Asahan	Mengambil langsung, mendapatkan salinan informasi	√		
		22 November 2019	Haris Munandar	Penyuluh	Mapping Potensi	Mengambil langsung, mendapatkan salinan informasi	√		
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Perindustrian	7 Februari 2019	Rafa Adhitya Ramadhan	PT. Sentosa Jawa, Stabat	Syarat Permohonan SIUP	Website	√		Sudah diteruskan ke dinas terkait

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Perdagangan								
		28 Februari 2019	Sri Ayu Ningsih	Queen Burger & Snack	Info Kegiatan Pameran Free Market	Website	√		Dijawab melalui website
		27 Maret 2019	Badrun Habibi	Medan	Laporan Perlindungan Konsumen	DM Instagram	√		Sudah diteruskan ke UPT. Perlindungan Konsumen Medan
		11 April 2019	Yuliarta Bakara	Medan	Info Harga Pupuk	DM Instagram	√		Sudah dijawab oleh Tim
		20 April 2019	Jonathan		Laporan Barang unutm pengawasan	Website	√		Sudah dijawab oleh Tim
		20 April 2019	Dini Lestari	Medan	Informasi Pelatihan	Website	√		Sudah dijawab oleh Tim
		11 Mei 2019	Agosani Usi Aslan	Medan	Informasi Diklat	Website	√		Sudah dijawab oleh Tim
		20 Mei 2019	Mermiati	Medan	Informasi Pameran	DM Instagram	√		Sudah dijawab oleh Tim
		1 Juli 2019	Evans Wesly	Mahasiswa USU	Pengujian Logam Berat	DM Instagram	√		Sudah diteruskan ke UPT PSMB Medan
		20 November 2019		PT. Nusa Makmur Kapital	Permohonan Izin Penerbitan e-SKA	Surat Resmi	√		Sudah dijawab melalui surat tertulis
		4 Desember 2019	Edward Taufik		Info Ekspor CPO	Twitter	√		Sudah dijawab melalui surat tertulis
		5 Desember 2019		PT. Permona	Permohonan Revitalisasi Ulang Mesin Pelinting	Surat Resmi	√		Sudah dijawab melalui surat tertulis
		19 Desember 2019	Gabriel Lukas		Informasi Pembuatan UD	Website	√		Sudah dijawab oleh tim
		24 Desember 2019	Sugimin Arista	Serdang Bedagai	Cara Izin Kepengurusan Pangkalan	Website	√		Sudah diteruskan ke dinas terkait
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17 September 2019	Muhammad Yusuf	SMA Negeri 1 Labuhan Deli	Penjelasan tentang RKB SMA Negeri 1 Labuhan Deli	Datang Langsung	√		Dijawab langsung oleh Tim
		17 September 2019	Agustina Ketaren	Karyawan Swasta	Peraturan Sempadan sungai untuk bangunan di Kota Medan	Surat Resmi	√		Sudah dijawab melalui surat tertulis

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 Oktoberr 2019	Dian Kusumawardh ani	BPIW Kementerian PUPR	Data Program pembangunan infrastuktur bidang PUPR tahun anggaran 2015-2019 dengan sumber dana APBD	Surat resmi	√		Sudah dijawab melalui surat tertulis
		15 Oktober 2019	Bintang M. Purba	Konsultan	Penyusunan Peraturan Zonasi dalam kawasan strategis	Surat resmi	√		Sudah dijawab melalui surat tertulis
22	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Sosial	4 Januari	Daniel Manik	-	Pemulangan masyarakat terlantar	Langsung	√		Selesai
		9 Januari	Fahri Abadi	-	Bagaimana cara mendapatkan surat penghantar rehabilitasi	Langsung	√		Selesai
		16 Januari	Darto	-	Bagaimana cara mendapatkan surat penghantar rehabilitasi	Langsung	√		Selesai
		16 Januari	Idris Koto	-	Syarat-syarat untuk bisa mendapatkan kaki palsu	Langsung	√		Selesai
		24 Januari	Dani Siregar	-	Menanyakan cara mendapatkan PKH	Langsung	√		Selesai
		8 Februari	Andri Yanto, SH Pold Sumut	-	Koordinasi dengan PPNS Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara	Langsung	√		Selesai
		15 Februari	Bambang Samudra	-	Menanyakan cara mendapatkan PKH	Langsung	√		Selesai
		15 Februari	Nurdianto	-	Pemulangan masyarakat terlantar	Langsung	√		Selesai
		21 Februari	Zuraidah	-	Syarat-syarat untuk bisa mendapatkan kaki palsu	Langsung	√		Selesai
		1 Maret	Muhammad Alfiansyah	-	Bagaimana cara mendapatkan surat penghantar rehabilitasi	Langsung	√		Selesai
		13 Maret	Saifullah Ramadhan	-	Syarat-syarat untuk mendapatkan kursi roda	Langsung	√		Selesai
		13 Maret	Parwes Pulungan	-	Pemulangan masyarakat terlantar	Langsung	√		Selesai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13 Maret	Rini Anggraini	-	Pelatihan dan kursus menjahit	Langsung	√		Selesai
		04 April	Muhammad Sukri	-	Menanyakan syarat-syarat Panti Jompo	Langsung	√		Selesai
		12 April	Abadi Manurung	-	Pemulangan masyarakat terlantar	Langsung	√		Selesai
		15 Mei	Syahrial Gunawan	-	Menanyakan syarat-syarat Panti Jompo	Langsung	√		Selesai
		15 Mei	Muksin	-	Pemulangan masyarakat terlantar	Langsung	√		Selesai
		8 Juli	Adi Hidayat	-	Syarat-syarat untuk mendapatkan kursi roda	Langsung	√		Selesai
		17 Juli	Ahmad Supriadi	-	Pemulangan masyarakat terlantar	Langsung	√		Selesai
		14 Agustus	Irwan Nasution	-	Syarat-syarat mengadopsi anak	Langsung	√		Selesai
		14 Agustus	Agung	-	Pra pensuin	Langsung	√		Selesai
		3 Oktober	Rony Barus	-	Menanyakan syarat-syarat mendapatkan bantuan PKH	Langsung	√		Selesai
		10 Oktober	Ningsih Kusuma	-	Pemulangan masyarakat terlantar	Langsung	√		Selesai
		23 Oktober	Marwan Iriadi	-	Pemulangan masyarakat terlantar	Langsung	√		Selesai
		07 November	Karang Taruna Kota Medan	-	Konsultasi dan koordinasi	Langsung	√		Selesai
		27 November	Maulida Sari	-	Menanyakan Syarat mendapatkan bedah rumah	Langsung	√		Selesai
		29 November	Malik Lubis	-	Konsultasi tentang undian	Langsung	√		Selesai
		3 Desember	Dedi Kusnandar	-	Pemulangan masyarakat terlantar	Langsung	√		Selesai
		3 Desember	Suryani	-	Menanyakan syarat-syarat mendapatkan bantuan PKH	Langsung	√		Selesai
		11 Desember	Aminah Tanjung	-	Syarat-syarat mengadopsi anak	Langsung	√		Selesai
		19 Desember	Viktor Simbolon	-	Konsultasi dan Koordinasi	Langsung	√		Selesai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	28 Januari 2019		PT. Petrokimia Gresik	Data Luas sasaran indikatif areal tanam pertanian sector pangan	Surat resmi	√		Subbag Program
		27 Februari 2019	Novalina Sari	Mahasiswa	Riset	Surat Resmi	√		Subbag Umum
		1 Juli 2019	Fakultas Pertanian Usu	Universitas Sumatera Utara	Data Sekunder	Surat Resmi	√		Subbag Umum
		22 Oktober 2019	Mahasiswa	Universitas Pancabudi	Pengambilan data produksi bawang merah	Surat resmi	√		Subbag Umum
25	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Satuan Polisi Pramong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Kepegawaian Daerah	30 Mei 2019	Aripiyanto	Masyarakat Umum	Daftar Nama CPNS yang dinyatakan Lulus Seleksi dari Tenaga Honorer K II tahun 2013 berasal dari Wilayah Kota Tanjungbalai	Website	√		Sudah dijawab melalui website
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	17 Januari	PPID Pembantu DESDM-SU		Data perizinan Galian C Wilayah Kab. Langkat	Koordinasi dengan Bidang Perizinan	√		Diterbitkan data perizinan yang diminta
		2 Maret	WALHI SUMUT		Rekap izin usaha perkebunan Kec. Muara Batang Gadis, Madina	Koordinasi dengan Bidang Perizinan	√		Diterbitkan data perizinan yang diminta
		3 Mei	KPK RI		Data dan informasi perizinan	Koordinasi dengan Bidang Perizinan	√		Diterbitkan data perizinan yang diminta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25 Mei	WALHI SUMUT		Data izin lingkungan PT. DPM SU	Koordinasi dengan Bidang Perizinan	√		Diterbitkan data perizinan yang diminta
		31 Mei	WALHI SUMUT		Data izin lingkungan dan izin lokasi	Koordinasi dengan Bidang Perizinan	√		Diterbitkan data perizinan yang diminta
		10 September	WALHI SUMUT		Data izin usaha perkebunan di SU	Koordinasi dengan Bidang Perizinan	√		Diterbitkan data perizinan yang diminta
		28 September	KPK RI		Data dan informasi perizinan	Koordinasi dengan Bidang Perizinan	√		Diterbitkan data perizinan yang diminta
		2 Oktober	KPK RI		Data dan informasi perizinan	Koordinasi dengan Bidang Perizinan	√		Diterbitkan data perizinan yang diminta
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27 Februari 2019	Vebriana Riskidayani Siregar	Mahasiswa	Struktur Organisasi	Langsung	√		Dijawab langsung oleh Tim
		27 Februari 2019	Nurhayati Hasibuan	Mahasiswa	Tugas dan Tanggung jawab bidang-bidang	Langsung	√		Dijawab langsung oleh Tim
		27 Februari 2019	Nurul Husna Isra Dewi	Mahasiswa	Jumlah Pegawai	Langsung	√		Dijawab langsung oleh Tim
		27 Februari 2019	Kholila Pohan	Mahasiswa	Sejarah Perusahaan/Kantor dan ruang lingkup bidang usaha	Langsung	√		Dijawab langsung oleh Tim
		6 Mei 2019	Elysa Suryani Siregar, Dorma	Mahasiswa	Struktur Organisasi BPKAD	Langsung	√		Dijawab langsung oleh Tim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tiurulina Sipayung						
		25 Juni 2019	Glendyna Miranda S.	Siswa	Profil BPKAD	Langsung	√		Dijawab langsung oleh Tim
		8 November 2019	Alviah Maeylani	Mahasiswa	Informasi Aplikasi dan Sistem yang berjalan di BPKAD, Rangkaian flowchart laporan pengeluaran keuangan BPKAD dan struktur pegawai BPKAD	Langsung	√		Dijawab langsung oleh Tim
		24 September	Irwadya Nurdiah	Mahasiswa	1. Sejarah 2. Struktur Organisasi 3. Tugas dan fungsi perusahaan 4. Bidang 5. Visi dan Misi	Langsung	√		Data tersedia
		16 Oktober	Ella Rahmasari	Mahasiswa	1. Sekilas tentang BPKAD (Tupoksi) 2. Sejarah tentang BPKAD 3. Visi, Misi dan Tujuan BPKAD 4. Struktur organisasi 5. Deskripsi tugas struktur organisasi 6. Departemen pada BPKAD	Langsung	√		Data tersedia
		12 Desember	Nur Hamidah	Mahasiswa	1. Rekap Absensi 2. SK Mutasi 3. SK TPP 4. RKA kegiatan sosialisasi 5. SKP 6. SK PNS 7. Struktur Organisasi 8. Latar belakang perusahaan	Langsung	√		Data tersedia
		12 Desember	Fitri	Mahasiswa	1. Rekap Absensi 2. SK Mutasi 3. SK TPP 4. RKA kegiatan sosialisasi 5. SKP	Langsung	√		Data tersedia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					6. SK PNS 7. Struktur Organisasi 8. Latar belakang perusahaan				
		12 Desember	Mitha Alvianita Siregar	Mahasiswa	1. Rekap Absensi 2. SK Mutasi 3. SK TPP 4. RKA kegiatan sosialisasi 5. SKP 6. SK PNS 7. Struktur Organisasi 8. Latar belakang perusahaan	Langsung	√		Data tersedia
		12 Desember	Sarah Rahmadani Hasibuan	Mahasiswa	1. Rekap Absensi 2. SK Mutasi 3. SK TPP 4. RKA kegiatan sosialisasi 5. SK PNS 6. Struktur Organisasi 7. Latar belakang perusahaan 8. Visi dan Misi	Langsung	√		Data tersedia
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Juli 2019	WALHI Sumut	LSM	Permintaan Dokumen Pembangunan	Surat resmi di kirim petugas kantor	√		Diarahkan langsung Kasubag Umum dan Kepegawaian

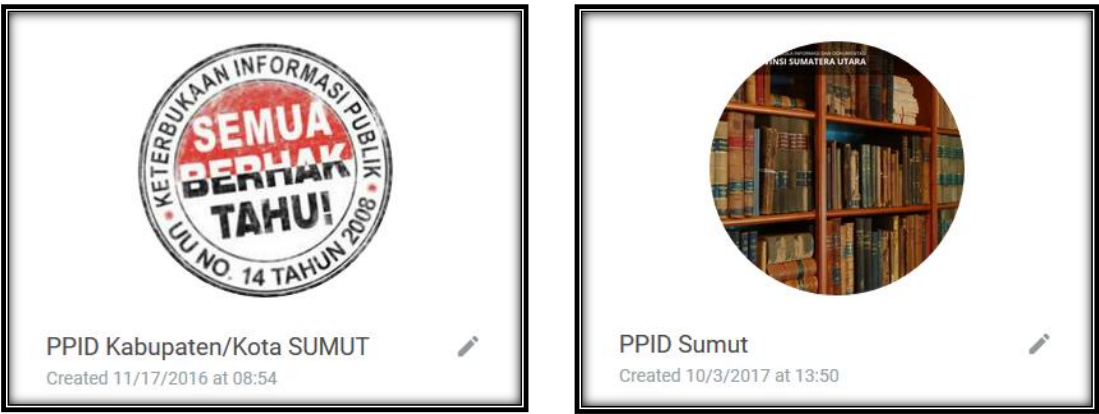
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		23 Agustus 2019	PT. Adizha Marathon	Perusahaan	Permohonan Survei Pengumpulan Data	Surat resmi di kirim petugas kantor	√		Diarahkan langsung Kasubag Umum dan Kepegawaian
36	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut PPID Provinsi Sumatera Utara telah didukung oleh PPID Pembantu yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam hal pelayanan informasi publik yang langsung kepada PPID Pembantu maupun permohonan informasi melalui PPID Utama.

Untuk memudahkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah dibuat Forum Koordinasi melalui aplikasi *WhatsApp* sebagai wadah komunikasi dan koordinasi bagi pejabat maupun petugas informasi yang berasal dari masing-masing PPID Pembantu. Demikian juga halnya dengan pembentukan Forum Koordinasi antara PPID Provinsi Sumatera Utara dengan PPID Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

Gambar 7
FORUM KOORDINASI PPID
SE - PROVINSI SUMATERA UTARA



Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2020 antara lain :

1. Belum sepenuhnya pejabat pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memahami UU KIP dan peraturan perundangan lain terkait KIP. Demikian juga halnya koordinasi antara PPID Pembantu dan unit kerja atau bidang yang menguasai informasi pada PPID Pembantu. Kondisi ini menyebabkan minimnya DIP yang

dipublikasikan oleh masing-masing PPID Pembantu, baik informasi dan dokumentasi yang wajib diumumkan dan disediakan kepada publik maupun informasi yang dikecualikan.

2. Belum tersedianya anggaran, sarana dan prasarana dalam memberikan layanan informasi kepada publik, sehingga terjadi tumpang tindih peralatan yang digunakan.
3. Pengelolaan daftar informasi publik pada setiap PPID Pembantu dan unit kerja OPD belum dilakukan dengan baik, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan pelayanan informasi.
4. Pemohon informasi belum mengenal dan memanfaatkan secara optimal sistem informasi publik melalui <http://ppid.sumutprov.go.id/> sehingga masih banyak pemohon yang harus datang langsung untuk meminta informasi publik meskipun informasi yang dibutuhkan sebenarnya ada yang telah tersedia pada sistem informasi.
5. Masih banyak pemohon informasi yang belum memenuhi kewajiban dan memenuhi peraturan dalam meminta informasi publik, sehingga permintaan informasi tidak dapat ditindaklanjuti.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, maka disarankan beberapa hal berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis KIP khusus kepada pejabat setiap OPD sebagai PPID Pembantu. Dari beberapa kali sosialisasi dan bimtek yang dilakukan masih belum optimal karena pada saat pelaksanaan kegiatan para pejabat yang berkaitan langsung dengan pelayanan informasi tidak hadir dan diwakilkan. Dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek yang tepat sasaran akan memudahkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.
2. Dalam rangka optimalisasi layanan informasi publik, setiap OPD selaku PPID Pembantu meningkatkan rencana kerja dan anggaran terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendukung tahun depan.
3. Mengadakan pertemuan dan koordinasi secara berkala kepada petugas informasi setiap PPID Pembantu dalam penyediaan daftar informasi publik yang berasal dari unit kerja OPD masing-masing agar dapat memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu.

4. Memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang adanya sistem informasi publik dengan alamat <http://ppid.sumutprov.go.id/> sehingga jika selanjutnya membutuhkan informasi yang lain dapat juga memanfaatkan sistem informasi ini.
5. Senantiasa memberikan edukasi dan bimbingan kepada pemohon informasi terkait kewajiban dan pemenuhan peraturan dalam layanan informasi publik agar permohonan informasi dapat segera dilayani.

Medan, April 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU PPID UTAMA



Ir. H. IRMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610905 199103 1 004